

FAMILY CARE UNIT DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KELUARGA

Fatwa Nurul Hakim

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

hakim.fatwa@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan program Family Care Unit atau FCU dalam menangani permasalahan keluarga. FCU adalah unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Tujuannya adalah meningkatnya koordinasi, kerja sama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga berbasis PSKS; meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan keluarga; menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini dengan *Mixed Method*, yaitu *dominan less dominan* kuantitatif, sehingga dapat mengukur tingkat efektivitas dari program FCU dalam menangani masalah keluarga. Subjek penelitian ini adalah pelaksana program, pengurus FCU sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dinas Sosial Kabupaten, dunia usaha, tokoh masyarakat, keluarga pionir, dan penerima manfaat yaitu keluarga plasma. Indikator penelitian meliputi program FCU, kelembagaan dan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian lembaga sosial di kelurahan cukup baik, namun sinergitas dalam penanganan kasus belum optimal. FCU berjalan dengan baik, karena mendorong kegiatan yang sudah ada di kelurahan menjadi lebih baik. Oleh karena itu FCU dapat diterapkan di kelurahan dengan melibatkan stakeholder yang ada serta perlu ada pendampingan yang intensif.

Kata Kunci: FCU, *Problem Solving*, Keluarga

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang kompleks, membutuhkan penanganan yang komprehensif dan integratif antarprogram terkait dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai program penanganan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah seperti beras miskin (*raskin*), Program Keluarga Harapan (PKH), Asuransi Kesejahteraan Sosial (*Askesos*), Asistensi Sosial Lanjut Usia (*Aslut*) dan Kartu Perlindungan Sosial namun hasilnya belum signifikan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 ada 28,59 juta jiwa dan pada tahun 2013 ada 28,07 juta jiwa, berarti mengalami penurunan sebesar 11,66 persen. (BPS 2013). Data yang lain menyebutkan pada tahun 2009 penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%) selanjutnya pada bulan Maret 2014 mengalami penurunan sebanyak 11,25 persen atau menjadi 28,28 juta jiwa, tetapi persentase penduduk miskin cukup banyak dan tidak

merata di setiap daerah (Kemiskinan di Indonesia www.google.com).

Masyarakat yang berada dalam kategori miskin akan mengalami berbagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di antaranya kebutuhan makan, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Berbagai keterbatasan tersebut akan berdampak pada penurunan kualitas hidup seperti timbulnya berbagai penyakit, kematian bayi dan ibu melahirkan akibat gizi buruk dan kekurangan harmonisan keluarga. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari negara dan berbagai pihak yang berkompeten dalam penanganan kemiskinan.

Berkembangnya masalah kesejahteraan sosial antara lain disebabkan terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak terpenuhinya hak dasar, krisis ekonomi, bencana alam, dan belum optimalnya sistem penanganan secara terpadu yang sinergis. Mengingat kondisi tersebut, maka dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dibutuhkan penanganan yang tepat, terintegrasi, dan mengoptimalkan sinergitas antar Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersedia di daerah. Perspektif kesejahteraan sosial institusi keluarga diposisikan sebagai PSKS sekalipun keluarga tersebut teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga (PMKS). Di dalam keluarga

tersimpan sumber daya yang dapat diberdayakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dialami keluarga dilakukan oleh Kementerian Sosial. Potensi sumber daya di daerah yang berbentuk Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan kelembagaan sosial yang dikenal dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lembaga sosial yang sudah terbentuk di tingkat desa/kelurahan tersebut, merupakan potensi yang dapat didayagunakan secara optimal sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis sinergitas di tingkat lokal dalam upaya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang ada. Lembaga sosial tersebut dinilai belum optimal yang ditengarai dengan belum terjadinya sinergitas dalam memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesejahteraan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Sosial c.q Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mengembangkan model pemberdayaan keluarga melalui program *Family Care Unit* (FCU) untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga. FCU merupakan bagian dari Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) yang memberikan pelayanan dan rujukan terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan.

FCU sebagai wahana membangun peningkatan koordinasi dan kerja sama yang sinergis, terpusat, dan optimalisasi sinergitas antar PSKS untuk merespon permasalahan dan kebutuhan keluarga dengan mengedepankan keluarga pionir untuk memberdayakan keluarga plasma (keluarga lainnya). Keluarga plasma adalah keluarga yang kurang mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsinya, mengatasi masalah dan menjangkau pelayanan sosial. Keluarga pionir adalah keluarga berkualitas yang dapat menjalankan peran dan fungsinya, dapat mengatasi masalah dengan cara-cara efektif serta dapat dijadikan sebagai teladan bagi keluarga lain yang memerlukan. Model ini menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan dan pendampingan keluarga plasma yang didukung oleh sinergitas PSKS yang tersedia di desa. Tujuan *Family Care Unit (FCU)* adalah meningkatnya koordinasi, kerja sama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga berbasis PSKS; Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan keluarga; Menumbuhkembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Rumusan penelitian ini bagaimana *Family Care Unit* dalam menangani permasalahan keluarga. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Family Care Unit* dalam menangani permasalahan keluarga.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Program *Family Care Unit* (FCU)

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial menginisiasi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan sosial yang dikenal dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Akan tetapi, selama ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan PSKS secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang terpusat dan terintegrasi serta mengoptimalkan sinergis antar PSKS, maka perlu sarana sebagai wahana membangun peningkatan koordinasi dan kerja sama yang sinergis dalam bentuk *Family Care Unit* (FCU). *Family Care Unit* (FCU) adalah unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis PSKS. Tujuannya adalah meningkatnya koordinasi, kerja sama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga berbasis PSKS; Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan keluarga; Menumbuhkembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Sasaran FCU adalah lembaga-lembaga pelayanan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga, keluarga pionir, dan keluarga plasma.

2. Kelembagaan Sosial dan Sinergitas

Indonesia Sejahtera (Indotera) diperlukan peningkatan sinergitas potensi, peran dan kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga sosial dan perguruan tinggi, dalam penanggulangan tujuh prioritas sasaran masalah kesejahteraan sosial, yaitu masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Menurut Binkerhaff (dalam Muhammad Nuh 2005, p.35-36) kolaborasi akan sulit muncul pada suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan otoritas karena semua urusan dan kepentingan publik diatur oleh Negara. Ketika kepercayaan tidak dimulai dari salah satu aktor, kemungkinan besar kolaborasi yang dibangun tidak akan berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi tentang keberadaan masing-masing lembaga. Sebaliknya, negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang demokratis lebih cenderung mengembangkan kerja sama dengan *civil society*, berdasarkan hal ini kesuksesan sebuah pemerintahan dan *civil society* sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik merupakan yang terkait dengan kerja sama.

Kebijakan Kementerian Sosial RI c.q Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial adalah mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang terpusat dan terintegrasi serta mengoptimalkan sinergitas antar PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial). Adapun harapan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga adalah mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial atas inisiasi dan kekuatan lokal yang peduli terhadap kesejahteraan sosial keluarga dalam wadah suatu aliansi. Di samping itu, diharapkan terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS secara sinergis di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Subyek penelitian ini adalah pihak terkait yang mempunyai kompetensi dan berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui model *Family Care Unit* (FCU). Subjek penelitian ini adalah pelaksana program, pengurus FCU (PSKS), LK3, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dunia usaha, tokoh masyarakat, keluarga pionir, dan penerima manfaat yaitu keluarga plasma. Analisis data menggunakan korelasi *product moment* yaitu menghubungkan antar variabel dimana X1

komunikasi, X2 Sikap petugas, dan X3 Sumber daya. Adapun Y adalah implementasi FCU tentang kelembagaan, kegiatan, kemitraan dan dukungan, serta hasil FCU. Analisis *product moment* menggunakan software SPSS seri ke 20. Untuk mengukur

efektivitas implementasi model pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit* (FCU) dengan menjumlah seluruh skor pada semua indikator yang berpengaruh, kemudian diperdalam dengan hasil wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Kelembagaan (pioneer dan pengurus)

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	47	100,00
2	Cukup baik	0	0
3	Kurang baik	0	0
4	Tidak baik	0	0
N		47	100,00

Sumber: Hasil Angket 2015

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa untuk kelembagaan semuanya 47 responden (100%) menyatakan sudah bekerja/sesuai dengan yang seharusnya lembaga tersebut bekerja, dalam kegiatan FCU menurut lembaga semuanya bekerja dengan baik yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi, baik itu seksi kesehatan pernah dari seksi ini merujuk anggota plasma yang menderita sakit dirujuk ke Puskesmas setempat, seksi pendidikan

pernah mengusahakan dari anggota plasma yang punya anak sekolah untuk meringankan pembiayaan SPP maupun seksi mengenai informasi pernah menginformasikan akan adanya anak hilang, semuanya saling mendukung dalam bekerja sehingga FCU sampai sekarang tetap ada dan berjalan dengan baik dan bahkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan yang dulunya jadi keluarga plasma sekarang sudah meningkat menjadi keluarga pionir.

• **Pengurus FCU Deli Serdang**

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	0	0
2	Cukup baik	3	6,38
3	Kurang baik	39	82,98
4	Tidak baik	5	10,64
N		47	100

Sumber: Hasil Angket 2015

Dalam kepengurusan FCU yang ada di sambirejo timur dari 47 responden 3 Responden (6,38%) menyatakan bahwa FCU sudah berjalan dengan cukup baik dan 39 responden (82,98%) menyatakan FCU berjalannya kurang baik dan ada 5 responden (10,64%) menyatakan tidak baik

hal tersebut dikarenakan dari 3 responden tersebut dari awal pembentukannya ikut terlibat aktif dalam kepengurusan, dan yang lainnya adalah tunjukan dari aparat kelurahan, karena untuk pembentukan FCU tersebut yang mengesahkannya adalah Kepala Desa setempat.

• **Kemitraan**

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	30	63,83
2	Cukup baik	14	29,79
3	Kurang baik	3	6,38
4	Tidak baik	0	0
N		47	100

Sumber: Hasil Angket 2015

Pada tabel Kemitraan di atas 30 responden (63,83%) FCU di sambirejo timur Deli Serdang kemitraannya baik, hal tersebut disebabkan karena antara mitra FCU di sana saling membantu dan saling memberikan contoh kepada keluarga plasma baik dalam berumah tangga, dalam hidup dengan lingkungan, beribadah dan lain-lain. dan ada 14 responden (29,79%) cukup baik hal mtersebut terjadi karena diantara responden dalam bermitra hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, serta 3 responden (6,38%) kurang baik hal tersebut terjadi karena FCU tersebut dalam bermitra hanya waktu ada masalah melakukan pendekatan.

• **Keluarga Pionir**

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	0	0
2	Cukup baik	5	10,64
3	Kurang baik	42	89,36
4	Tidak baik	0	0
N		47	100

Sumber: Hasil Angket 2015

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk keluarga Pionir di Sambirejo Timur, Deli Serdang sudah cukup bisa memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pionir sebanyak 5 responden atau (10,64%) dan yang lainnya yaitu 47 responden (89,36%) kurang optimal dalam memahami tentang pionir hal tersebut disebabkan karena anggota pionir cara memasukkannya anggota hanya ditunjuk oleh aparat desa (Kepala Desa) tanpa adanya

sosialisasi yang menyeluruh, sehingga dari sebagian anggota pionir kurang memahami akan tupoksi pekerjaannya. Untuk itu sebanyak 5 responden di atas (10,640%) anggota pionir yang sudah mengetahui akan tupoksi pekerjaannya, karena anggota tersebut sejak awal dibatkan/mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan pembentukan Pionir tugas-tugas apa saja yang perlu dilaksanakan oleh anggota Pionir terhadap anggota Plasma.

• **Keluarga Plasma**

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	0	0
2	Cukup baik	3	23,07
3	Kurang baik	10	76,93
4	Tidak baik	0	0
N		13	100

Sumber: Hasil Angket 2015

Menurut tabel di atas, bahwa untuk keluarga plasma di Desa Sambirejo Timur, Deli Serdang untuk pemahaman mengenai FCU masih sangat rendah terbukti dari 13 anggota plasma 10 anggota (76,93%) belum

memahami mengenai FCU, dan hanya 3 anggota (23,07%) sudah tahu mengenai FCU. Hal tersebut disebabkan karena FCU disana di margorejo timur masih baru dan pemahamannya dari anggota plasma pelak-

sanaan di lapangan masih bersama-sama dengan program kementerian sosial yang lain, umpamanya dulu ada bantuan mesin jahit dari Depatemen Sosial, hal tersebut menjadikan anggota plasma menyebutnya semuanya bantuan itu dari FCU.

1. Kondisi lokasi penelitian

Kondisi lokasi penelitian merupakan daerah uji coba pelaksanaan FCU, di satukelurahan atau desa yang memiliki aktivitas pelayanan sosial yang lebih baik kepada warganya. Pelayanan sosial yang ditujukan kepada warga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan sosial yang ada di desa/kelurahan. Lokasi dapat dikatakan cenderung mempunyai kesamaan dari aspek kelembagaan yang melakukan pelayanan sosial. Lembaga-lembaga yang peduli tersebut sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain (IPSM, KT, WKSBM, PKBM, KUBE, LPP/LPK, PKK, PAUD, LPMD/K, Posyandu, Polides, Posdaya, Kelompok Keagamaan, Arisan, dan Paguyuban lain yang berada di desa/kelurahan. Aspek daerah pemilihan FCU sudah memenuhi kriteria sebagai daerah yang memiliki lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap keluarga. Lokasi FCU pada umumnya di kelurahan/desa terletak tidak jauh dari ibukota provinsi kabupaten/kota atau kecamatan.

2. Karakteristik Responden

Gambaran karakteristik responden ke sembilan lokasi menurut jenis kelamin menunjukkan keberagaman baik laki-laki ataupun perempuan. Walaupun jenis laki-laki lebih banyak (80 %). Umur yang dimiliki responden juga bervariasi dari usia 20 tahun sampai lebih 60 tahun dan dominan pada usia produktif (95 %). Responden kebanyakan sudah menikah (95 %) akan tetapi sebagian kecil dalam status janda ataupun duda. Aspek pendidikan responden kebanyakan lulusan jenjang SLTA (50 %) dan lulusan sarjana (25%), Lulusan SD terdapat (5 %) sedangkan lulusan SMP terdapat (20%), ini menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan FCU. Pekerjaan yang dimiliki responden beragam baik dari PNS, petani, pedagang, buruh, wiraswasta dan lainnya. Sedangkan bentuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan FCU sudah dimulai sejak 2013 saat FCU dilantik, akan tetapi juga terdapat yang baru mulai tahun 2014 atau 2015. Ini menunjukkan bahwa ada perkembangan dari keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan FCU.

3. Deskripsi Kelembagaan

FCU sebagai wahana pemberdayaan keluarga memiliki kelembagaan terdiri atas a. Pilar-pilar sosial/anggota FCU terdiri atas perwakilan dari unsur PSKS (ketua atau

anggota dari IPSM, KT, WKSBM, PKBM, KUBE, LPP/LPK, PKK, PAUD, LPMD/K, Posyandu, Polides, Posdaya, Kelompok Keagamaan, Arisan, dan Paguyuban lain yang berada di desa/kelurahan serta perseorangan seperti tokoh masyarakat. b. Keluarga pioner dan c. Keluarga Plasma. Pengetahuan responden mengenai kelembagaan FCU diperoleh jawaban dengan kriteria baik. Hal ini mengacu pada nilai jawaban responden sebanyak 98% menyatakan baik terhadap kondisi kelembagaan FCU. Ini berarti bahwa sebagian besar responden pelaksana yang terdiri atas pengelola, anggota jejaring dan keluarga pioner telah mengetahui keberadaan FCU di desa mereka. Pengetahuan itu menyangkut pembentukan, legalitas, pengelola, pengorganisasian, pengadministrasian, dan kesekretariatan.

Kelembagaan *Family Care Unit* (FCU) di sembilan lokasi sudah terbentuk sejak tahun 2013 dan kepengurusan lembaga telah dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan keputusan Kepala Desa/Lurah. Pengelola *Family Care Unit* (FCU) adalah forum aliansi/gabungan dari berbagai lembaga pelayanan sosial keluarga di tingkat desa/kelurahan, seperti IPSM, Karang Taruna, WKSBM, Posyandu, Polides, Posdaya, Pusaka, LPP/LPK, PKK, PAUD, LPMD/K, PKBM UP2K, Pendidik TPQ, LPM paguyuban sinoman, kelompok keagamaan, arisan, dan atau para pegiat

sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga. Pembentukan kepengurusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pengelola FCU terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta Kelompok Kerja yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan keluarga, baik bagi keluarga pioner maupun keluarga plasma, serta masyarakat umum di lingkungannya. Pembentukan keluarga Pioner berasal dari keluarga yang menjadi panutan di masyarakat seperti, unsur BPD, Kepala Dusun, RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan penggiat sosial. Keberadaan kesekretariatan yang dimiliki oleh FCU di sembilan lokasi sudah ada, akan tetapi belum semua memenuhi syarat-syarat yang layak/lengkap. Papan nama FCU telah terpasang di depan kantor desa/kelurahan dan balai desa/kelurahan, sementara kantor sekretariat masih menjadi satu dengan kantor balai desa dan belum memenuhi syarat sebagai sekretariat yang layak dan kondisinya kurang tertata. Ruang yang dimiliki pun belum semua mempunyai papan data yang disajikan seperti peta keluarga pioner maupun keluarga plasma, pengelolala FCU data PSKS.

Berkait dengan pelaporan semua FCU sudah melaksanakan pelaporan. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan atau pengelolaan

FCU. Pelaporan yang baik seharusnya diawali dari pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan secara teratur, sehingga memiliki dokumen yang jelas baik menyangkut kelembagaan maupun kegiatan, pengelolaan keuangan dan pendampingan terhadap keluarga plasma. Pengadministrasian dari kesembilan lokasi belum semua memiliki administrasi yang lengkap meliputi: a) Jadwal kegiatan, b) Daftar hadir kegiatan, c) Data keluarga pionir dan plasma, d) Kelompok kerja (Pokja) terdiri Pokja Identifikasi dan seleksi, Advokasi Sosial, Pemberdayaan Keluarga, Rujukan dan Kesehatan keluarga. e) Peta sosial sebaran keluarga pionir dan plasma, f) Memiliki dokumen kegiatan berupa laporan keuangan dan foto kegiatan sinergitas. Administrasi yang sudah lengkap hanya dimiliki oleh lokasi Cilegon, Lombok Tengah, dan Singkawang.

Pengadministrasian oleh pengelolaan FCU secara umum telah dilaksanakan berupa ketersediaan buku administrasi antara lain daftar hadir, laporan keuangan dan buku notulen. Akan tetapi dokumen perencanaan FCU, data potensi dan sumber pelayanan peta sebaran pioner dan plasma, peta sosial potensi dan sumber pelayanan belum semua memiliki. Kegiatan kunjungan dan penjangkauan keluarga pioner kepada keluarga plasma dalam membantu mengatasi masalah keluarga plasma belum terdokumentasi

dengan baik kecuali FCU Singkawang. Kegiatan lainnya misalnya bimbingan mental, spritual, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan belum terdokumentasi dengan baik. Mereka hanya melakukan dengan secara lisan bahwa kalau ada masalah keluarga kemudian disalurkan ke pengurus FCU yang lebih berwenang untuk mengatasinya.

4. Deskripsi Kegiatan FCU

Pelaksanaan kegiatan FCU di sembilan lokasi sudah dilaksanakan dengan baik (nilai jawaban responden yang menjawab sebanyak 78%) sedangkan 22% menjawab tidak baik. Hal ini terbukti dengan adanya pandangan responden yang menyatakan kegiatan sudah baik dapat dilihat dari adanya pembagian tugas antar pengelola yaitu dibentuknya kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan dibentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tata tertib kepengurusan juga sudah ada dengan pertanggungjawaban masing-masing pengurus untuk melakukan kegiatan. Hal ini terlihat dari jenis kegiatan yang sudah dilakukan meliputi sosialisasi FCU (pemahaman FCU melalui majelis taklim, PKK, Karang Taruna). Bimbingan sosial, mental, spiritual oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, bimbingan sosial bagi remaja masjid, bimbingan sosial bagi wali murid

PAUD, peningkatan kapasitas FCU, rapat bulanan, rakor FCU, pembinaan sosial bagi remaja, khitanan masal bagi keluarga kurang mampu, kunjungan pengurus FCU dan keluarga pioner ke keluarga plasma, sosialisasi bahaya narkoba, bakti sosial menyambut bulan romadhon, pembagian sembako bagi fakir miskin dan jalan sehat.

Selain itu, pernah dilakukan: a) Sosialisasi program FCU, b) Bimbingan sosial, mental dan spiritual oleh tokoh masyarakat, b) Konsultasi satu kali dengan LK3 tentang masalah tindak kekerasan, c) Pelatihan UEP kerja sama dengan Dinas Sosial, d) Bantuan sosial pendidikan bagi anak yatim dari rumah zakat, e) Bantuan kesehatan inklusif berupa kartu BPJS, f) Pernah diberikan bantuan modal untuk KUBE dari Dinas Sosial dan dari rumah Zakat. Bimbingan mental spiritual sudah sering dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam pengajian atau melalui dasawisma FCU juga memberikan bimbingan dan konsultasi, pembudayaan nilai keluarga, melakukan penguatan ekonomi keluarga plasma, melakukan rujukan ke pusat pelayanan seperti LK3 maupun SKPD terkait yang berkompeten apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat desa, lingkungan bersih dan sehat adalah pembuatan komposter dan tanamisasi di halaman rumah yang bermanfaat untuk konsumsi keluarga, sehingga

dapat dihemat pengeluaran konsumsi keluarga dan bantuan mesin jahit. Di samping hal di atas, kegiatan FCU melakukan advokasi kebijakan yang tidak ramah bagi kelompok marginal maupun kepentingan masyarakat terutama penyanggah masalah kesejahteraan sosial agar dapat menjangkau jaminan sosial maupun pelayanan sosial dasar, serta pendampingan kepada keluarga pioner. FCU membagi kelompok dampingan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan kegiatan mempunyai jadwal tetap. Waktu kegiatan pertemuan yang membahas berbagai persoalan keluarga plasma diadakan tiap bulan sekali, kadang-kadang diisi dengan bimbingan mental spiritual. Data potensi dan sumber pelayanan sosial selalu ada dan dimanfaatkan seperti Posyandu. Kegiatan posyandu diadakan setiap bulan sekali yaitu posyandu lansia maupun balita, Polindes, Karang Taruna, PKK, dan PAUD. Data keluarga pionir maupun data keluarga plasma dan peta sebaran serta peta sumber dan potensi sosial sudah ada bahkan juga ada pembentukan kelompok dampingan keluarga plasma.

5. Deskripsi Kemitran

Sinergitas lembaga lembaga pelayanan kesejahteraan keluarga di sembilan lokasi penelitian sudah nampak dan cukup baik, (hasil total dari jawaban responden sebesar

72% sedangkan 28 % menyatakan tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari belum terkoordinasi secara maksimal baik perencanaannya, operasional dan hasilnya. Upaya FCU dalam membangun jejaring dilakukan secara “jemput bola” yaitu dengan mendatangi atau pun melalui telpon dengan dinas, swasta/perusahaan dan masyarakat, namun demikian upaya untuk bisa didukung dana CSR dari dunia usaha belum bisa terwujud. Kerja sama internal di FCU sudah bisa berjalan baik, hanya terkendala pada kesibukan pengurus di masing masing lembaga/tempat bekerja merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja/capaian program FCU.

Kemitraan antara pengurus dan pioner sudah cukup baik. Adanya pertemuan untuk mengatasi permasalahan keluarga plasma. Hubungan yang saling bersinegi dalam kepengurusan dengan tidak membedakan status atau pun kedudukan dalam organisasi mereka. Jalinan pengurus dengan keluarga pioner dilakukan secara terus menerus. Apabila suatu masalah belum terselesaikan akan diberikan kepada musyawarah desa ataupun *stakeholder* yang lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga plasma.

Kemitraan di bidang sosial adalah kemitraan dalam pelayanan sosial. Lembaga pelayanan sosial perlu menjalin kemitraan

dengan berbagai pihak seperti lembaga kesehatan, pendidikan, kehakiman, kepolisian dan pertanian serta lembaga terkait lainnya, agar mencapai hasil pelayanan yang efektif dan efisien. FCU telah menjalin kemitraan meliputi rumah sakit, Polres, sekolah, LBH, P2TP2A, perguruan tinggi dan dunia usaha serta LK3 sebagai *center link*, yang akan memberi rujukan kepada lembaga lembaga mitra. Dukungan dari lembaga lembaga aliansi dan dunia usaha baik, tetapi belum ada dukungan dari SKPD terkait kepada FCU. Informasi yang diperoleh menunjukkan kurang adanya komunikasi dan koordinasi dari Kementerian Sosial dengan FCU yang berada di tingkat desa. Meskipun Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi di daerah, tetapi baru sampai di Dinas Sosial tingkat provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota termasuk kepada SKPD terkait belum dilakukan sehingga belum dapat mendorong SKPD terkait untuk mendukung FCU. Keberadaan FCU dari informasi yang diperoleh ternyata kurang dikenal oleh SKPD terkait, hal ini karena kurangnya sosialisasi oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program.

6. Deskripsi Hasil

Keberhasilan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS dapat diketahui dari jumlah layanan yang

ditangani secara terpadu, keaktifan anggota aliansi, pencatatan kasus yang dimiliki, jejaring kerja, pertemuan rutin yang dilaksanakan dan pemanfaatan PSKS untuk penanganan kasus.

FCU telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal. (sebanyak 83 % menyatakan baik dan 17% menyatakan tidak baik). Hal ini dapat dilihat dari data tingkat keaktifan pengurus/pengelola, anggota jejaring, keluarga pioner dan keluarga plasma selalu hadir mengikuti pertemuan rutin. Pendokumentasian kegiatan yang dilakukan masih belum tertib. Kepedulian keluarga pioner kepada keluarga dilakukan dengan membantu memecahkan masalah dalam keluarga plasma misalnya masalah pendidikan, kewarganegaraan, ekonomi serta masalah keluarga lainnya. Memberikan bimbingan sosial dan konsultasi serta informasi kepada keluarga plasma. Bimbingan spiritual yang diberikan kepada keluarga plasma melalui pengajian yasinan sedangkan bagi warga yang non muslim kegiatan dilakukan melalui dasawisma. Pemberian bantuan rujukan ataupun informasi tentang kesehatan, pendidikan dan pelayanan KTP, surat keterangan tidak mampu, posyandu dan pernikahan sudah dilakukan oleh pengurus FCU kepada keluarga plasma. Keluarga plasma dapat

mengakses pelayanan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar(KIP), BSM ataupun akses bimbingan usaha ekonomis yang hasilnya membantu ekonomi keluarga plasma. FCU juga mendorong peningkatan keluarga untuk menabung melalui majelis taklim, jamiyah salawatan, dan yasinan yang terselenggara secara rutin. Tabungan dibuka pada waktu bulan puasa saat mendekati hari lebaran sehingga sangat terasa manfaatnya. FCU juga mendorong keluarga plasma lebih aktif menjalankan ibadah yang berdampak pada peningkatan ketahanan mental dalam menghadapi kesulitan hidup. Tampak pada frekwensi jumlah peresta yang hadir, teradministrasi, dan terdokumentasi, hasil setiap pertemuan. Indikator kualitatif terlihat pada kesanggupan keluarga pioner untuk selalu membantu keluarga plasma apabila tertimpa masalah dengan cara merujuk atau menjembatani ke LK3. Keluarga Pioner juga membangun hubungan sosial yang baik dan bimbingan mental kepada keluarga Plasma. Mereka aktif mengunjungi secara rutin sesuai jadwal yang ada.

7. Keluarga Plasma

Satuan keluarga secara konseptual mempunyai delapan fungsi meliputi fungsi reproduksi, ekonomi, edukasi, sosial, protektif, rekreatif, afektif, dan religius. Keluarga apabila tidak dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana tersebut, akan

mengalami permasalahan keluarga dan ketahanan keluarga akan terganggu sehingga berdampak pada kondisi kesejahteraan keluarga. Keluarga plasma diberdayakan oleh keluarga pioner dengan mendasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, baik berupa pengetahuan, keterampilan dan budaya lokal. Kegiatan pemberdayaan dilakukan secara terencana, konsensus/kesepakatan, sinergitas antar jejaring, saling mengisi dan menguatkan sehingga diharapkan mencapai hasil yang optimal. Sinergitas hanya akan tercapai apabila ada komitmen, kesediaan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu mengentaskan keluarga plasma, membuka akses terhadap sumber-sumber pelayanan yang diperlukan keluarga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Keluarga plasma cukup baik yang dinyatakan oleh 86 % baik, sedangkan 14 % menyatakan tidak baik dalam melaksanakan kegiatan FCU. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mereka yang menyatakan aktif dalam kegiatan pertemuan FCU. Dokumentasi dari pertemuan kadang-kadang di dokumentasikan dalam bentuk foto ataupun daftar hadir. Pemberian bantuan yang dilakukan pengurus FCU dengan cara melakukan rujukan antara lembaga yang ada dalam FCU yaitu dengan cara memberitahu keluarga plasma kepada lembaga yang memiliki kepentingan terhadap per-

masalahan plasma. Sebagai contoh apabila ada keluarga plasma yang mengalami kekurangan uang (modal) maka lembaga yang ada misalnya dari PSM akan memberitahukan kepada keluarga pioner dapat meminjam ke koperasi.

Keluarga pioner sering menjalin komunikasi dengan keluarga plasma antara lain dalam bentuk, pertemuan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian karena keluarga plasma mengalami permasalahan keluarga. Bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga plasma yaitu dengan memberikan bimbingan sosial, memberikan konsultasi dan mengajak untuk melakukan pembinaan mental spiritual dengan bersama-sama warga menghadiri pengajian ataupun kegiatan dasawisma. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh keluarga pioner dalam bentuk informasi dan edukasi tentang masalah kesehatan, pembuatan KTP atau surat keterangan lain yang diperlukan keluarga plasma, juga pemberian bantuan ekonomi serta bantuan pendidikan. Selain itu, pengakuan keluarga plasma mendeskripsikan pioner setelah ada intervensi program FCU sebagai berikut: kepedulian keluarga pioner, kemampuan memberikan bimbingan, konsultasi dan informasi sistem sumber yang tersedia, sikap pengurus terhadap keluarga plasma, keaktifan keluarga plasma mengikuti pertemuan dan

kegiatan pemberdayaan serta aksesibilitas dalam jaminan sosial, hak sipil, kepemilikan tabungan dan ketaatan menjalankan ibadah serta dokumentasi kegiatan FCU. Pengurus FCU mengakui kelemahan dalam mencatat atau mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan FCU, dan kedepan akan berusaha lebih tertib. Berkaitan dengan kemampuan keluarga pioner dalam pembimbingan dan pendampingan kepada keluarga plasma diakui sudah baik. Kegiatan pembimbingan dan pendampingan dari keluarga pioner telah mampu mendorong dan meningkatkan kondisi kesejahteraan keluarga plasma menjadi lebih baik, meningkatkan kebersamaan dan sinergitas kelembagaan yang ada di desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi kelompok rentan, marginal maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial.

8. Efektivitas FCU

Hasil dari penghitungan efektivitas model pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit* (FCU) menunjukkan bahwa. Hasil rata-rata penjumlahan dari jawaban responden mendapatkan hasil 79,8%, mempunyai makna pelaksanaan FCU efektif. Adapun untuk variabel kemitraan dinyatakan cukup sehingga perlu untuk ditingkatkan. Hasil analisisregresi menunjukan bahwa $F= 1177,038$ dan $p =$

0.000. ($p < 0,01$), maknanya ada hubungan yang sangat signifikan. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan secara regresi antara variabel (X) yaitu sikap, komunikasi, sumber daya manusia pelaksana FCU dan variabel (Y) yaitu keberhasilan program FCU.

KESIMPULAN

- a. Program pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit* sudah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman terhadap program terutama bagi keluarga pioner dan keluarga plasma.
- b. Program *Family Care Unit* sangat dirasakan manfaatnya bagi keluarga plasma, yaitu mereka sudah terbantu dalam mengatasi masalah keluarganya.
- c. Adanya kepedulian dari lembaga-lembaga sosial yang ada di kelurahan/desa cukup baik, tetapi sinergitas dalam penanganan kasus masih belum optimal, meskipun demikian kegiatan FCU dapat berjalan baik.
- d. Adanya FCU dapat mendorong kegiatan yang sudah ada di desa/kelurahan lebih baik. Oleh karena itu, *stakeholder* (Dinas Kabupaten/Kota) dapat menerapkan FCU di desa/kelurahan lain.

- e. Sumber daya manusia pelaksana belum/ kurang memahami tentang konsep program FCU.
- f. Dana operasional yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi kurang efektif karena lokasi FCU dilevel desa/keluarhan. Sementara itu, belum ada dukungan dana dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pendampingan FCU.

SARAN

- a. FCU sebagai program baru perlu ditingkatkan sosialisasinya, agar warga mengetahui keberadaannya. Dengan di sosialisasikan secara luas diharapkan masyarakat tahu tentang FCU, mendapat dukungan, mau dan mampu melaksanakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dan atau penanganan masalah sosial keluarga yang berbasis PSKS. Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program perlu meningkatkan sosialisasi tentang program FCU secara intensif kepada *stakeholder* dan SKPD terkait, seperti dengan: Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, pengurus FCU, keluarga pioner dan keluarga plasma sehingga program dapat terpahami dengan baik, benar dan menyebar. Kegiatan sosialisasi tersebut bisa melalui penyelenggaraan *work-*

shop, penyebaran pamflet, dan berupa pembinaan masyarakat di pertemuan yang diadakan di masyarakat.

- b. Pelaksana FCU agar dapat bekerja dengan baik perlu peningkatan kapasitas melalui bimtek terkait pengelolaan FCU melalui Workshop, simulasi, studi banding dan penyuluhan sosial tentang cara-cara melakukan kegiatan pendampingan kepada keluarga plasma, sehingga keluarga plasma dapat berubah menjadi keluarga pioner. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial atau pun Dinas Sosial Provinsi.
- c. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan FCU melalui *sharing* dana dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten/Kota perlu dilakukan, dan tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di desa/kelurahan.
- d. Peningkatan komunikasi secara berjenjang dari Kemensos ke Dinsos Provinsi, kabupaten/kota dan pengelola FCU serta keluarga pioner kepada keluarga plasma, sehingga memudahkan solusi dari masalah yang dihadapi. Peningkatan koordinasi dengan kegiatan *supervise, monitoring* dan evaluasi agar pelaksanaan program sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian

- Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota
- e. Perlu memasukkan kegiatan FCU yang sinergi dengan kegiatan yang ada di desa/kelurahan dengan melakukan pendampingan rencana anggaran yang dilakukan di desa/kelurahan. Kegiatan ini dilakukan oleh Pengelola FCU dengan bermusyawarah dengan perangkat desa/kelurahan.
- f. Perlunya dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan FCU agar pendampingan yang dilakukan baik dari Dinas Provinsi, Dinas kabupaten/Kota atau pun pengurus FCU dapat berjalan

dengan baik. Dana dapat dianggarkan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- e. Perlu untuk melanjutkan program FCU ke lingkup yang lebih luas yaitu diseminasi ke desa/kelurahan lain diluar desa/ kelurahan uji coba FCU.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Dasuki. 2008. *Upaya-upaya Ketahanan Sosial Terhadap Bencana Alam Melalui Peningkatan Peran Organisasi Sosial Lokal*, Media Informasi Tanggap. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Departemen Sosial RI, Edisi April, 2008 Jakarta.
- Edwards III, George C. 1992. *Implementing Publik Policy*, Congressional, Quartely Press.
- Ikawati, dan Siti Aminatun. 2002. *Dilema Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Publika.
- Kementerian Sosial RI. 2013. *Pedoman Uji Coba Model Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Model Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit (FCU)*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
- Mehkelsen, British. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, sebuah buku pegangan bagi praktisi lapangan.
- Nuh, Muhammad. 2005. *Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Kerja sama Ford

Foundation dengan pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan Sosial
UGM

- Rachyuningsih, Eny. 2010. *Kebijakan Kemitraan Publik, Privat Dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata*. Disertasi. Universitas Brawijaya Malang.
- Su'adah. 2005. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: UMM Press.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta , Bandung.
- Sulistiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Sulistiati. *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi (Pemberayaan Sosial Keluarga)* Badan pelatihan dan Pengembangan Sosila Departemen Sosial RI.
- Supriyatna, Tjahya. 2000. Jakarta: Strategi *Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta.
- William J, Goodle. 2007, *Sosiologi Keluarga*. Bina Aksara, Jakarta.